



LAPORAN AUDIT DATA: ANALISIS KEBOCORAN ANGGARAN PEMKAB SIMALUNGUN TAHUN 2024

I. Metodologis Analis

Laporan ini disusun menggunakan metode analisis data sekunder terhadap Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Nomor 35.B/LHP/XVIII.MDN/04/2025. Data diekstraksi secara digital untuk memetakan risiko inefisiensi anggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

II. Rincian Tenuan Finansial

- Kelebihan Bayar Belanja Pegawai: Rp 437.125.887,00 (Kec. Jorlang Hataran, BPKPD, PUTR, Disdik, Dinkes, BPBD).
- Temuan Proyek Gedung RSUD Parapat: Rp 455.808.500,73 (Kelebihan Bayar) dan Rp 74.380.719,60 (Denda Keterlambatan).
- Temuan Fisik Dinas PUTR: Rp 720.335.622,77 (Kekurangan Volume dan Mutu 8 Paket Pekerjaan).
- Dana BOSP Pendidikan: Rp 217.790.936,00 (Penggunaan Tidak Sesuai Ketentuan).
- Pembayaran Ganda Perjalanan Dinas: Rp 69.379.400,00 (Tersebar di 18 SKPD).

III Anomali Administrasi Aset

Berdasarkan dokumen pemeriksaan, ditemukan ketidakteraturan manajemen aset berupa:

- Kendaraan dinas tanpa dokumen BPKB yang sah.
- Tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat (Risiko Sengketa).
- Rekening operasional di sejumlah RSUD yang belum memiliki landasan Keputusan Bupati.

IV. Rekomendasi Pemulihan

Dinas terkait wajib melakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah atas seluruh kelebihan pembayaran yang telah menjadi temuan BPK dalam jangka waktu 60 hari sesuai mandat undang-undang.